



KEJAR KUOTA PPDB 20 PERSEN WARGA MISKIN

Pengurusan Surat Keterangan Melonjak



Warga antre menunggu pelayanan pengurusan surat keterangan keluarga miskin di Dinsos Kota Yogyakarta.

UMBULHARJO (MERAPI) - Warga yang mengurus surat keterangan keluarga tidak mampu untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK membanjiri Kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Dari jalur tersebut, terdapat kuota 20 persen bagi warga miskin.

Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial Dinsos Kota Yogyakarta Supriyanto menyatakan, lonjakan pengurusan surat keterangan keluarga miskin terjadi sejak awal pekan. Dalam sehari pelayanan surat keterangan keluarga miskin bisa mencapai 400 orang/hari.

"Warga yang mengurus bisa mencapai 300 hingga 400 orang perhari. Pengurusan surat keterangan itu untuk masuk SMA/SMK dari keluarga miskin syaratnya harus ada surat keterangan," kata Supriyanto, Jumat (29/6).

Salah satu parameter Dinsos Kota Yogyakarta membuat surat keterangan keluarga miskin adalah memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS). Selama ini Pemkot Yogyakarta telah memiliki program perlindungan sosial bagi keluarga miskin lewat KMS. Oleh sebab itu dalam surat keterangan yang dibuat untuk keperluan PPDB SMA/SMK negeri di DIY, disebutkan calon siswa dari keluarga pemegang KMS.

"Di Kota Yogya tidak ada surat keterangan keluarga miskin karena sudah ada KMS selama ini. Jadi di surat keterangan yang dibuat menjelaskan calon siswa dari keluarga pemegang KMS," paparnya.

Meskipun ada lonjakan pengurusan surat keterangan, Dinsos Kota Yogyakarta tidak menambah jumlah petugas pelayanan. Namun warga harus sabar antre menunggu pengurusan surat keterangan itu. Diupayakan pelayanan surat keterangan keluarga miskin untuk PPDB itu selesai dalam satu hari. "Kami akan tetap layani warga sampai jam kerja," tambah Supriyanto.

PPDB juga berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) di Kota Yogyakarta meningkat. Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi menjelaskan beberapa pelayanan yang meningkat tajam di antaranya pengesahan atau legalisir akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik.

"Sebenarnya ada legalisir kependudukan yang bisa dilakukan di kecamatan seperti kartu tanda penduduk elektronik. Tapi warga banyak yang langsung ke Dindikcapil karena sekalian mengurus legalisir lainnya jadi satu," terang Sisruwadi. (Tri-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. Sosial	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. Din. Dinkapil	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005